

PERAN LANTAMAL XIII TARAKAN SEBAGAI KOMANDO UTAMA KEWILAYAHAN MATRA LAUT DALAM MENJAGA KEDAULATAN NKRI

Heri Mulyanto

Pasis Dikreg Seskoal Angkatan 61 TA 2023

Email : septiandavid54@gmail.com

<http://doi.org/10.52307//jmi.v912.146>

Abstrak

Blok Ambalat, merupakan sebuah perairan kaya sumber daya mineral yang berada di utara Selat Makassar dan barat Laut Sulawesi. Secara historis dan berdasar Konvensi Hukum Laut Internasional, Blok ini merupakan bagian yuridiksi NKRI. Blok Ambalat ini dalam beberapa tahun kebelakang secara serius diawasi dan dijaga oleh unsur dibawah jajaran TNI Angkatan Laut. Hal ini terjadi akibat klaim sepihak oleh negara tetangga Indonesia, Malaysia. Malaysia sendiri, pasca melakukan klaim atas blok Ambalat, secara aktif melalui tentara laut dirajanya sempat melakukan patroli di area klaim mereka hingga melewati perairan yuridiksi Indonesia. mereka bahkan sempat melakukan pengusiran terhadap para nelayan Indonesia hingga yang sangat mengkhawatirkan adalah upaya penangkapan Warga Negara Indonesia yang melakukan aktifitas di Blok Ambalat dan sekitarnya. Mensikapi hal ini, TNI Angkatan Laut memperkuat unsur patroli keamanan perairan hingga memperkuat komando kewilayahan matra laut disana. Peningkatan Lanal Kelas-B Tarakan menjadi Lantamal XIII Tarakan adalah langkah nyata efektif yang dilakukan TNI Angkatan Laut dalam rangka menjaga Kedaulatan NKRI terutama di sekitar utara Selat Makassar dan wilayah Laut Sulawesi yang menjadi wilayah yang coba di klaim sepihak oleh negara Malaysia.

Kata Kunci : Blok Ambalat, Lantamal-XIII Tarakan.

Abstract

The Ambalat Block is a body of water rich in mineral resources located north of the Makassar Strait and west of the Sulawesi Sea. Historically and based on the International Maritime Law Convention, this block is part of the jurisdiction of the Republic of Indonesia. In recent years, the Ambalat Block has been seriously supervised and guarded by elements under the ranks of the Indonesian Navy. This happened as a result of a unilateral claim by Indonesia's neighboring country, Malaysia. Malaysia itself, after making a claim over the Ambalat block, actively through its royal navy had patrols in the area of their claim until it passed through Indonesian jurisdictional waters. they even had time to expel Indonesian fishermen so that what was very worrying was the attempt to arrest Indonesian citizens who were carrying out activities in the Ambalat Block and its surroundings. In response to this, the Indonesian Navy has strengthened the maritime security patrol element and strengthened the territorial command of the maritime dimension there. The upgrade of Tarakan Class-B Naval Base to

Lamtamal XIII Tarakan is a real effective step taken by the Indonesian Navy in order to protect the Sovereignty of the Republic of Indonesia, especially around the northern Makassar Strait and the Sulawesi Sea region which is an area that Malaysia is trying to claim unilaterally.

Keywords: Ambalat Block, Lantamal-XIII Tarakan.

PENDAHULUAN

Belum hilang dari ingatan kita bersama akan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 di Den Hagg yang mengalahkan Indonesia dan memenangkan Malaysia terkait status kepemilikan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Meski secara aspek historis dan lainnya, kita kalah atas Malaysia, keputusan itu tetap memberi makna pahit mendalam bagi sebagian masyarakat Indonesia. Blok Ambalat muncul kedalam kamus permasalahan teretorial antara Indonesia dan Malaysia. Masalah Blok Ambalat ini muncul masih berkaitan dengan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Blok yang secara historis dan berdasar Hukum Laut Internasional menjadi bagian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) oleh mereka (Malaysia) coba diusik menjadi bagian negaranya. Kali ini Malaysia, dengan dasar landas kontinen Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan mencoba membuat peta wilayah terkini dengan mengkonversi Hukum Laut Internasional terkait negara kepulauan yang mengakibatkan bertambahnya teretorial laut Malaysia secara signifikan hingga menjangkau tidak hanya Ambalat, namun hingga mendekati gugus kepulauan negara Filipina.

Tindakan sepihak ini, azasnya mengabaikan aturan rezim Hukum Laut Internasional (UNCLOS-1982). Malaysia yang menurut UNCLOS-1982 sebagai negara pantai, mencoba secara sepihak memanfaatkan aturan penarikan wilayah teretorial laut atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan berdasar konsep negara kepulauan. Mengatas nama setiap pulau memiliki hak untuk menentukan wilayah teretorial dan landas kontinen, Malaysia mengklaim sepihak wilayah sekitar perairan sekitar Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan sehingga mengakibatkan tumpang tindih teretorial dengan tetangganya, Filipina dan Indonesia. 2 negara terakhir adalah negara kepulauan.

Blok Ambalat sejak lama diincar oleh Malaysia ketika mereka mengetahui kandungan minyak dan gas bumi melimpah disana. Akan tetapi berbagai kendala terkait aturan yuridiksi dan hukum laut internasional menghambat mereka. Ketika Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan diputuskan sebagai bagian negaranya, Malaysia kembali mencari celah upaya penguasaan atas Blok Ambalat. Tidak hanya melalui diplomasi, Malaysia memanfaatkan Tentara Laut Dirajanya (Angkatan Perang Malaysia) untuk secara aktif menunjukkan eksistensi

diberbagai wilayah perairan yang masuk kedalam klaim mereka.

TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan utama pertahanan matra laut melalui berbagai unsur yang dimiliki dengan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut (Lantamal) XIII Tarakan sebagai pangkalan sandar, senantiasa melaksanakan giat patroli keamanan di Blok Ambalat. Lantamal XIII Tarakan, merupakan sebuah komando utama wilayah pertahanan matra laut di Kalimantan bagian utara yang area kerjanya meliputi seluruh perairan Selat Makassar berdampingan dengan Lantamal VI Makassar dan sebagian Laut Sulawesi, berdampingan dengan Lantamal VIII Manado. Dengan menjadikan Lantamal XIII sebagai pangkalan sandar untuk operasi keamanan dan pertahanan di Blok Ambalat, hal ini membuat giat patroli keamanan dan penegakkan kedaulatan NKRI di Blok Ambalat menjadi lebih efektif dan efisien.

Tertarik untuk mengulas permasalahan ini, penelitian terkait peran Lantamal XIII Tarakan sebagai komando utama kewilayahan matra laut dalam menjaga keutuhan NKRI mensikapi polemik akibat klaim sepihak Malaysia di Blok Ambalat disusun.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan merujuk prosedur penelitian kualitatif Creswell

(1994). Disain penelitian dilakukan dengan paradigma *post-positivisme*. Paradigma *post-positivisme* ini dipilih karena penelitian tentang peran Lantamal XIII Tarakan Sebagai Komando Utama Kewilayahan Matra Laut Dalam Menjaga Kedaulatan NKRI Studi Kasus Blok Ambalat merupakan "*observed facts*" yang akan menghasilkan "*knowledge based on experience*", yaitu suatu konsep baru yang disusun berdasarkan temuan penelitian terhadap informan penelitian (sumber literatur) dari kebijakan pemerintah pusat dengan penentuan informan menggunakan *snow ball technique*. menggunakan teknik tela'ah literatur, pengalaman dan observasi untuk menghasilkan sebuah kesimpulan.

PEMBAHASAN

United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Merupakan Konvensi Hukum Laut Internasional. Konvensi ini ditanda tangan di Montegi Bay-Jamaica tanggal 10 Desember 1982 dan diberlakukan sejak 16 November 1994. Indonesia dan Malaysia adalah salah satu negara yang turut menanda tangan.

Untuk Negara Kepulauan, terkait batas wilayahnya dan berbagai kepentingan yuridiksi lain dibahas UNCLOS-1982 di Baba IV pasal 46 hingga 54. Penentuangaris batas wilayahnya adalah garis pangkal kepulauan. Artinya pengukuran wilayah kedaulatan Negara Kepulauan di tentukan oleh titik terluar pulaunya dengan aturan

penarikan 12 NM sebagai zona utama atau Laut Teritorial ditambah zona tambahan (24 mil laut), zona ekonomi eksklusif, ZEE (200 mil laut) dan landas kontinen (350 mil laut atau bahkan lebih). Lebar masing-masing zona ini diukur dari referensi yang disebut dengan garis pangkal (*baseline*).

Negara Kepulauan sendiri menurut UNCLOS 1982 adalah suatu negara yang wilayahnya merupakan sebuah atau lebih pulau hingga gugus kepulauan. Kepulauan sendiri artinya suatu gugus pulau yang memiliki hubungan erat sehingga menjadi suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik secara utuh baik secara yuridiksi maupun historis. Berdasarkan terminologi ini, Indonesia merupakan Negara Kepulauan

Negara pantai merupakan negara yang memiliki bibir pantai dan berkedudukan/melekat pada sebuah benua. Untuk sebuah negara pantai, menurut UNCLOS 1982 pengukuran wilayah teritorial laut dan zona tambahannya didasarkan pada garis pangkal pantai (*coastal baseline*), mengacu pada Bab II Bagian 1 Pasal 2 Kedaulatan suatu Negara pantai, selain wilayah daratan dan perairan pedalaman. Kedaulatan ini meliputi ruang udara di atas laut serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.

Adapun zona kelautan yang dimaksud di atas terdiri dari Perairan dalam, Laut Teritorial, Zona Tambahan, ZEE, dan Laut Bebas. Zona Kelautan yang paling utama

adalah Laut Teritorial, dimana sebuah negara memiliki kedaulatan penuh terhadap permukaan laut, kolom air, ruang udara di atas laut, serta dasar laut dan lapisan tanah dibawahnya.

Perbedaan prinsip dengan negara kepulauan, meski negara pantai memiliki pulau diluar wilayahnya yang melekat pada sebuah benua, negara dimaksud tidak dapat dikategorikan sebagai negara kepulauan karena bukan merupakan sebuah negara yang murni sebagai suatu gugus kepulauan. Malaysia meski memiliki banyak pulau, bagian wilayahnya berada pada semenanjung Malaya yang merupakan bagian dari Asia daratan. Negara pantai seperti Malaysia tidak dapat melakukan penarikan batas wilayah dengan menggunakan garis dasar landas kontinen pulaunya melainkan berdasar garis dasar pantainya. Kondisi ini yang diterjemahkan oleh Indonesia yang berhak atas kedaulatan penuh atas Blok Ambalat.

Strategi Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat *defensif* aktif, yang mengandung pengertian bahwa pertahanan negara tidak ditujukan untuk melancarkan agresi terhadap negara lain, namun secara aktif menangkal, mencegah dan mengatasi segala bentuk ancaman yang ditujukan terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa (Buku Putih Kementerian Pertahanan, 2015). Terkait masalah blok Ambalat, perkuatan TNI Angkatan Laut dengan menggelar unsur

armada di area dimaksud dan meningkatkan status pangkalan kepada tingkat lebih tinggi, tidak bertujuan untuk konfrontatif kedalam wilayah kedaulatan negara lain melainkan untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI.

Malaysia adalah salah satu negara tetangga terdekat Indonesia tidak saja dari kewilayahan, melainkan dari segi historis dan kebudayaan. Malaysia dan Indonesia selain dilaut, berbatas langsung di darat pada Pulau Kalimantan dan Pulau Sebatik. Selain itu Malaysia, Indonesia, Singapura bersama Brunei Darussalam secara demografi dianggap sebagai negara serumpun. Serumpun sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah komunitas yang berasal dari satu keturunan atau sama nenek moyang-nya, dalam hal ini Rumpun Melayu. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kesamaan budaya hingga kesamaan serta kemiripan bahasa.

Meski demikian, keterikatan masa lampau ini bukan berarti membuat hubungan sebagai bangsa dan negara berdaulat memiliki harmonisasi baik dan seimbang. Menurut dra Awani Irawati, MA kala menjabat Kepala Bidang Perkembangan Politik Internasional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Malaysia sebagai negara berdaulat kerap mengesampingkan kepentingan negara-negara tetangganya ketika melihat ada sebuah keuntungan atas diri mereka. Salah satu contohnya terkait Blok Ambalat.

Hingga tahun 2010, tercatat sudah 30 kali Pemerintah Indonesia melayangkan nota protes kepada Pemerintah Malaysia terkait tindakan pelanggaran wilayah oleh mereka, namun tidak satupun digubris. Dan sejarah mencatat, seluruh negara di kawasan Asia Tenggara memiliki konflik kepentingan terkait batas wilayah di laut dengan Malaysiakecuali Laos. Laos sendiri tidak berkonflik dengan Malaysia dikarenakan mereka tidakmemiliki garis batas perairan (Lipi, 2010)

Blok Ambalat adalah sebuah wilayah perairan milik Indonesia yang areanya mencakup 15.235 km². Secara geografis terletak di utara Selat Makassar dan sebagian perairan Laut Sulawesi. Secara yuridiksi, blok ini berbatas laut dengan Malaysia. Jauh sebelum penemuan kandungan mineral bernilai tinggi di perairan Blok Ambalat, Indonesia dan Malaysia telah melaksanakan perjanjian Tapal Batas berdasar Landas Kontinen di wilayah perairan (termasuk didalamnya Zone Ekonomi Eksklusif kedua belah pihak). Perjanjian itu sendiri ditanda tangan pada tanggal 27 Oktober 1969. Berdasarkan perjanjian ini, Blok Ambalat merupakan bagian Indonesia.

Masalah pertama muncul pada tahun 1979 pasca penelitian kandungan mineral di perairan Laut Sulawesi dimana kala itu ditemukan kandungan minyak dan gas yang besar di Blok Ambalat. Secara sepihak Malaysia kemudian menerbitkan sebuah peta baru yang memasukkan beberapa

wilayah perairan kedalam bagian negara mereka, termasuk didalamnya Blok Ambalat. Peta ini tumpang tindih dengan perairan banyak negara tidak saja Indonesia dan mendapat reaksi penolakan dari Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina hingga Tiongkok. Terkait perairan sekitar Laut Sulawesi sendiri, secara sepihak Malaysia membagi dua blok konsesi minyak di Laut ini kedalam bagian negara mereka; yakni Blok Y (ND6) Wilayah Blok Ambalat yang merupakan wilayah Indonesia dan Blok Z (ND7) yang menjadi bagian negara Filipina.

Puncak arogansi Malaysia terjadi pada 16 Februari 2005 dimana mereka memberikan konsesi eksplorasi minyak kepada perusahaan minyak patungan Inggris dan Belanda di Blok Ambalat. Kekerasan hati Malaysia ini didasari perhitungan laut teritorial dan zone ekonomi eksklusif dengan dasar keberadaan Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan. Hal ini menyalahi UNCLOS-1982, Malaysia melakukan prosedur penarikan garis pangkal kepulauan (*Archipelagic baseline*) dari Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan yang mengakibatkan masuknya Blok Ambalat kedalam wilayah mereka. Disebut menyalahi UNCLOS-1982 karena sebagai negara pantai, Malaysia tidak dapat melakukan hal itu. Apalagi secara dimensi luas, Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan merupakan pulau yang relatif kecil dan bukan sebuah gugus kepulauan, sehingga rezim penetapan batas landas kontinen berdasar garis pangkal kepulauan

tidak dapat diberlakukan disana. Yang terakhir adalah pendapat pemerintah Indonesia dengan dasar UNCLOS-1982.

Arogansi Malaysia dilanjutkan dengan melakukan operasi menggunakan kekuatan militer berupa patroli keamanan di perairan yang di klaim hingga menjangkau teritorial Indonesia. Tanggal 21 Februari 2005, 17 warga negara Indonesia di tangkap oleh KD (Kapal Diraja) Sri Malaka milik Angkatan Laut Malaysia di Karang Unarang. Karang Unarang adalah titik kunci strategis batas wilayah Indonesia. tindakan ini disertai upaya pengusiran nelayan-nelayan Indonesia yang berada di Ambalat. Hal ini mendapat reaksi keras oleh TNI Angkatan Laut yang segera menerjunkan unsur KRI (Kapal perang Republik Indonesia)-nya di sana.

April tahun 2005, terjadi gesekan yang hampir memicu konflik senjata ketika KD Rencong harus diusir dengan cara di serempet oleh KRI Tedong Naga-819 (8 April). Hal yang menyebabkan Panglima TNI kala itu mengeluarkan Surat Keputusan tegas pada tanggal 21 April 2005 yang bunyinya TNI Angkatan Laut hanya boleh melepaskan tembakan jika AL atau pihak lain (aparatus) dari Malaysia lebih dahulu menembak (Kusumadewi, 2015). Keputusan ini meski berbunyi larangan menembak lebih dahulu, akan tetapi maknanya TNI Angkatan Laut harus siap menghadapi berbagai dinamika dilapangan termasuk didalamnya bertempur ketika ada ancaman nyata. Selama periode 2005,

Indonesia mencatat upaya pelanggaran wilayah oleh Tentara Laut Diraja Malaysia unsur maritim lain mereka di perairan Kalimantan Utara (termasuk Blok Ambalat) mencapai 35 kali.

2007, kembali Malaysia melakukan provokasi aktif. 24 hingga 25 Februari, kapal-kapal milik Tentara Diraja Malaysia kembali berulah. Tercatat, KD Budiman melakukan penerobosan wilayah perairan Indonesia hingga mencapai 1 mil (pukul 10.00 WITA). Perbuatan ini diikuti KD Sri Perlis-juga kapal milik Tentara Diraja Malaysia menjelang senja sejauh 2 mil. Kali ini, upaya mereka diusir oleh KRI Welang-808 yang tengah berpatroli. Esok harinya (tanggal 25 Februari), KD Sri Perlis kembali melakukan provokasi wilayah, masuk sejauh 3.000 yard pagi hari (09.00 WITA) dan berhadapan dengan KRI Untung Soeropati-372. Sesaat setelah KD Sri Perlis diusir, sebuah Pesawat Patroli Malaysia kembali melakukan ulah provokatif. Akibat ulah Malaysia, ditahun itu TNI Angkatan Laut menyiagakan 4 unsur yang berpatroli secara bergantian di area yang di Klaim Malaysia (KRI Ki Hajar Dewantara-364, KRI Untung Suropati-372, KRI Welang-808, dan KRI Keris-624).

Tahun 2009. Selama 1 semester awal, Malaysia melakukan pelanggaran wilayah hingga 13 kali. Hal yang membuat Kepala Staf TNI Angkatan Laut-KSAL kala itu, Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno memperkuat unsur kekuatan TNI Angkatan

Laut dengan menerjunkan Pasukan Marinir di Ambalat disamping KRI yang secara kontinyu telah berpatroli bergantian. Sikap KSAL sejalan dengan Menteri Sekretariat Negara yang kala itu dijabat oleh Hatta Rajasa yang secara tegas menyampaikan bahwa Indonesia tidak akan pernah melepaskan Ambalat meski sejengkal (1 Juni 2009). Hal ini adalah bentuk ketegasan Pemerintah Indonesia dan tidak berfikir membawa masalah Ambalat ke Mahkamah Internasional karena berdasarkan fakta historis dan Konvensi Hukum Laut secara kuat menyatakan kebenaran posisi Indonesia (Kusumadewi, 2015).

Upaya pelanggaran terus dilakukan Malaysia dan Indonesia mensikapinya dengan memperkuat unsur serta kekuatan laut serta tidak berhenti melayangkan Nota Protes ketika hal ini terjadi. Nota ini sangat penting sebagai bentuk pernyataan kedaulatan oleh Indonesia atas apa yang coba diupaya Malaysia. Hal ini ditegaskan oleh Mayor Jendral (Mayjen) TNI Fuad Basya selaku Kepala Pusat Penerangan TNI tahun 2015 dimana intinya beliau menyampaikan bahwa nota protes sangat penting dilayangkan ketika terjadi sebuah insiden pelanggaran wilayah kedaulatan hal ini sebagai bentuk pernyataan kedaulatan. Hal ini juga demi mencegah terjadinya *Quo Statuta* mengacu pada pengalaman buruk Indonesia terkait kasus di Pulau Sipadandan Pulau Ligitan (Pratama, 2015).

Berbagai pelanggaran dan kekukuhan

pendirian Malaysia ini adalah salah satu faktor pemicu Panglima TNI kemudian meningkatkan status Pangkalan TNI-AL (Lanal) Kelas-B Tarakan yang sebelumnya dijabat seorang Perwira Menengah (Pamen) TNI-AL berpangkat Letnan Kolonel (Letkol) menjadi Pangkalan Utama dipimpin oleh seorang Laksamana berbintang satu. Dengan keberadaan Lantamal di Pulau Tarakan, yang hanya berjarak sekitar 65 NM dari lok Ambalat-area yang selama ini diupaya untuk dijadikan area sengketa oleh Malaysia membuat dukungan logistik dan hal lain terkait kesiap siagaan KRI selaku unsur utama patroli di perairan dimaksud menjadi lebih efisien.. Dengan kedekatan jarak area konflik dengan sebuah komando utama kewilayahan, diharapkan laju gerak TNI dapat lebih efektif secara dalam waktu tempuh dan logistik lain ketika melaksanakan operasi pengamanan hingga penghadangan atas segala upaya provokatif pihak asing terkait Blok Ambalat yang dilakukan bangsa asing, termasuk Malaysia.

Pulau Tarakan merupakan pulau dengan banyak wilayah rawa ini mulai muncul di peta strategis dunia pada awal abad 20 ketika Belanda yang kala itu menjajah Indonesia menemukan potensi minyak bumi di Tarakan. Dalam waktu singkat, Pulau Tarakan berkembang dengan pesat seiring masuknya *Bataafsche Petroleum Maatschappij* (BPM) sebuah perusahaan eksplorasi minyak cabang atau anak perusahaan perminyakan Belanda,

Royal Dutch atau yang sekarang dikenal dengan nama *Shell*. BPM membuka banyak ladang minyak di Pulau Tarakan sehingga perkampungan di di Pulau Tarakan berkembang menjadi perkampungan besar dan saat ini dikenal sebagai Kota Tarakan. Pada Perang Dunia II (PD-II), Pulau ini menjadi salah satu mutiara yang gigih dipertahankan baik oleh pemerintah Kolonial Belanda maupun pendudukan Jepang, semua tidak lepas karena keberadaan minyak disana.

Nilai Pulau Tarakan bagi pertahanan Indonesia yaitu sebagai salah satu pulau dengan sumber daya mineral, Pulau Tarakan memiliki nilai strategis penting di bidang pertahanan. Pulau Tarakan memiliki dermaga sandar yang cukup besar dengan fasilitas lapangan terbang memadai. Kota Tarakan sendiri saat ini merupakan salah satu kota terbesar di Kalimantan Utara dan dijadikan sebagai pusat pemerintahan daerah. Secara geografis, Pulau Tarakan hanya berjarak sekitar 65 NM dari Blok Ambalat. Terkait permasalahan di Ambalat, Tarakan menjadi sangat vital dengan kelengkapan pendukung pertahanan yang dimilikinya.

Beberapa bulan lalu, tepatnya 22 September 2022, puluhan nelayan menyemarakkan giat perayaan Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia di perairan sekitar Karang Unarang. Kegiatan ini diinisiasi oleh Komandan Lantamal XIII Tarakan yang kala itu di jabat oleh Laksamana Pertama (Laksma) TNI Fauzi, S.E., M.M. Hal ini

adalah bentuk keteguhan dan keseriusan Lantamal XIII terkait posisinya sebagai penjaga tapal batas laut Indonesia di perairan utara Selat Makassar dan Laut Sulawesi (Dzulviqor, 2022).

Lantamal XIII Tarakan sendiri resmi berdiri sebagai salah satu pangkalan utama di jajaran TNI Angkatan Laut tanggal 9 Juni 2015 melalui Peraturan Panglima TNI, Perpang TNI Nomor 12 tahun 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Lantamal XIII Tarakan (Mabes TNI, 2015). Validasi ini sangat penting dalam rangka memperkuat satuan kewilayahan yang memiliki perbatasan perairan yang memiliki kerawanan teretorial. Perpang ini selanjutnya dalam waktu singkat disambut oleh KSAL dengan dikeluarkannya Peraturan Kasal Nomor 3 Tahun 2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Peningkatan Pangkalan TNI-AL Kelas-B Tarakan menjadi Pangkalan Utama TNI-AL XIII (Mabes AL, 2015). Lanal Kelas-B Tarakan sendiri berdiri sejak tahun 1968.

Sebagai Pangkalan Utama, Lantamal XIII Tarakan memiliki berbagai tugas pokok selain melaksanakan fungsi dukungan terhadap unsur TNI Angkatan Laut yang ada dan/atau sedang melaksanakan operasi di wilayah kerjanya. Salah satu tugas pokok itu adalah melaksanakan kegiatan pembinaan serta menyelenggarakan operasi keamanan laut demi tegaknya hukum dan kedaulatan negara di laut. Untuk itu, secara organisasi saat ini Lantamal XIII Tarakan diperkuat unsur KRI berupa KRI Pari-849

(PC-40) dan KRI Sidat-851 (PC-43) serta berbagai unsur Kapal Angkatan Laut (KAL) untuk patroli keamanan dan penegakkan kedaulatan. PC merupakan singkatan dari Patroli Cepat, artinya kapal dengan kode PC memiliki kecepatan lebih tinggi dibandingkan kapal atau unsur lain milik TNI Angkatan Laut.

Selain unsur-unsur yang melekat di Lantamal XIII, untuk wilayah utara Selat Makassar dan Laut Sulawesi, TNI Angkatan Laut terus melakukan upaya penunjukan jatidiri/eksistensi di berbagai wilayah perairan perbatasan dengan melakukan perkuatan unsur KRI dari jajaran Komando Armada (Koarmada) II secara bergantian, yang terakhir KRI I Gusti Ngurah Rai-332. Selain itu juga, dilakukan berbagai latihan melibatkan unsur KRI disekitar perbatasan. Latihan terakhir di wilayah sekitar Blok Ambalat dilaksanakan pada Januari 2023 dengan menerjunkan KRI Mandau-621 dan KRI Keris-624. Latihan ini menurut KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali selain untuk melatih kesiagaan dan kesiapan unsur KRI milik TNI Angkatan Laut, juga menjadi wujud kehadiran TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan negara di perbatasan (Achmad, 2023).

Latihan yang dilaksanakan selain melaksanakan manuver taktis operasi keamanan perbatasan juga dilakukan berbagai kegiatan seperti; "*Flaghoist*" yaitu latihan komunikasi serta koordinasi antar unsur dengan menggunakan media kibaran

bendera. Latihan ini sangat penting sebagai bentuk komunikasi dalam kondisi tertentu demi keamanan personel dan materiil; dan *Replenishment At Sea Approaches* (RASAP) atau kegiatan bekal ulang di tengah laut antar unsur, latihan ini dimaksudkan agar kapal dapat memperpanjang masa patroli tanpa harus kembali ke pangkalan.

KSAL memandang penting perkuatan unsur armada di wilayah utara Selat Makassar utamanya terkait permasalahan kerawanan klaim wilayah atas perairan milik Indonesia di sana, termasuk didalamnya adalah Blok Ambalat yang merupakan sebuah mutiara minyak dan gas bumi dunia. Blok ini disinyalir memiliki cadangan minyak serta gas bumi melimpah untuk pemanfaatan hingga 30 tahun ke depan. Satu buah titik saja, dalam hal ini yang diberi nama lapangan Aster oleh Pemerintah Indonesia memiliki kapasitas produksi minyak 30.000-40.000 barel perhari. Selain itu, di satu titik lainnya (dari sembilan titik tambang yang ada) menyimpan kandungan 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun³ gas. (Kementerian ESDM, 2009)

Sebuah hal yang ambigu ketika Malaysia tetap pada pendiriannya, bahwa Blok Ambalat masuk kedalam wilayah Negara Malaysia berdasarkan peta negara tahun 1979. Pendirian salah kaprah secara sejarah dan Konvensi Hukum Laut yang Malaysia sendiri turut menanda tangan dan turut meratifikasinya bersama 160 negara

lain di dunia. TNI Angkatan Laut selaku komponen utama pertahanan matra laut tidak akan pernah tinggal diam menghadapinya. Seperti apa yang diamanahkan oleh Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono di sela perayaan Hari Armada tahun 2021 di Markas Komando (Mako) Koarmada RI II kala beliau masih menjabat sebagai KSAL, "Satu yard-pun tidak akan kita mundur, karena tidak ada tawar menawar untuk urusan menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa, prinsip ini harus kita pegang teguh selamanya meskipun nyawa yang menjadi taruhannya" (Koarmada II, 2021).

KESIMPULAN

Kepentingan ekonomi kadang kerap menyebabkan sengketa kewilayahan antar negara. Hal ini menjadi sebuah ancaman keamanan dan kedaulatan bagi negara yang terlibat. Peneliti memiliki keyakinan kuat, ini adalah faktor utama sikap ngotot negara tetangga untuk menguasai Blok Ambalat meski mereka harus bertentangan dengan rezim Hukum Laut Internasional. Namun, menghadapi sikap ngotot dan tanpa dasar ini Pemerintah Indonesia melakukan upaya tegas sesuai dengan prinsip pertahanan kita yang defense aktif. Penetapan dan peningkatan Lanal Kelas-B Tarakan menjadi Lantamal XIII Tarakan adalah salah satu upaya nyata terkait hal ini. Keberadaan Lantamal XIII Tarakan sebagai komando utama kewilayahan matra laut di Kalimantan

Utara terbukti efektif dalam mendukung kesiap siagaan unsur TNI Angkatan Laut menegakkan kedaulatan NKRI di seluruh wilayah perbatasan yang masuk kedalam area kerja Lantamal XIII Tarakan termasuk di dalamnya Blok Ambalat. ***Jalesveva Jayamahe.***

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, N.M. 2023. TNI Angkatan Laut (AL) Menggelar Latihan di Perairan Ambalat, Perbatasan Indonesia dan Malaysia *kompas.com*, diakses 20 Maret 2023.
- Creswel, John. W. 1994. *Research Design Qualitative & Quantitative Approaches*. Sage Publication : New Delhi
- Haruma, I 202). Kasus Ambalat: Kronologi dan Penyelesaiannya *Kompas.com*, diakses 20 Maret 2023
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI. 2009. Cadangan Minyak Besar Ditemukan di Ambalat. Kementerian ESDM, 17 April 2009, diakses 27 Maret 2023
- Kementerian Pertahanan RI. 2015. *Buku Putih Pertahanan*. Kemenhan-RI.
- Komando Armada RI II. 2021. *Amanat Kepala Staf TNI-AL Pada Peringatan Hari Armada RI Tahun 2021*. Koarmada RI
- Kusumadewi, A. 2015. Sejarah Panjang Kemelut Indonesia-Malaysia di Ambalat. *CNN Indonesia*, 17 Jun 2015, diakses 28 Maret 2023.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2010. Pidato SBY Soal Malaysia, Negara Serumpun Sudah Basi, Malaysia Perlu Shock Therapy. *Website Lipi*, 3 September 2010, diakses 28 Maret 2023
- Pratama, A.B. 2015. Dibayangi Jet Malaysia, Ambalat Dicemaskan TNI Lepas dari RI. *CNN Indonesia*, 17 Juni 2015, diakses 28 Maret 2023
- Nusamedia. Irewati, Awani dan Indriana Kartini (Ed.). 2019. *Potret Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tentara Nasional Indonesia. 2005. *Skep Panglima TNI No Skep/156/IV/2005 tanggal 21 April 2005 tentang pelibatan unsur TNI AL di wilayah perbatasan perairan Kaltim*. Mabes TNI
- Tentara Nasional Indonesia. 2015. *Perpang TNI No. 12 tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015 tentang Pengesahan Validasi Organisasi dan Tugas Lantamal XIII Tarakan*. Mabes TNI
- Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. 2015. *Perkasal No. 3 Tahun 2015*

tanggal 30 Juni 2015 tentang Peningkatan Pangkalan TNI-AL Kelas- B
Tarakan menjadi Pangkalan Utama TNI-AL XIII. Mabes TNI-AL

United Nation, 1982. United Nations Convention on the Law Of the Sea. 1982.
Montegi Bay-Jamaica, 10 Desember 1982